

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, J. E. (1975). *Public Policymaking (2nd ed.)*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Amri Marzali (2012), *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,b), 20.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy (10th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (3rd ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Edward, G. C., III. (1980). *Implementasi kebijakan publik*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politik dan implementasi kebijakan di dunia ketiga*. Princeton University Press.
- Patton, M. Q. (2011). *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*. Guilford Press.
- Stone, D. (2002). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. W.W. Norton & Company.
- Thomas R. Dye (2015), *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall), 113.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). Proses implementasi kebijakan: Kerangka konseptual. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo, S. (2013). *Kebijakan Publik: Konsep dan Proses Penyusunan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Achmad Bagoes Wijaya Kusuma Tarmizi, Endro Sugiartono. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1), 24-32.

- Ainiyah, Ghonimah Z, Siti Maesaroh, Margono. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara. *Perwira Journal of Economics and Business* (PJEB), 1(1), 90-98.
- Azim, Muhamad Fadli, Jaka Laksana Tejasunarya, Mila Ayu Ardiani, Ernah Efriyanah, Trisna Taufik, Miko Polindi, and Putri Diesy. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 1: 1.
- Herman, D., & Fajar, E. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Negara di Kementerian Keuangan dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Efisien. *Jurnal Pengelolaan Aset Negara*, 5(1), 45-59.
- Kemala, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 4(2), 38-47.
- Lumingkewas, E., Brain Fransico Supit. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 14(2), 1106-1116.
- Puspitoarum, MA. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 229-241.
- Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 77-93.
- Suryani, D., & Setiawan, B. (2022). Efektivitas Pemanfaatan BMN dalam Meningkatkan Kinerja Layanan Publik di Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 14(2), 75-90.
- Siregar, Mario Bungaran, Dahyar Daraba, Faria Ruhana. (2024). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi Kemendikbudristek." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3: 2449–66.
- Yusri, M. & Chandra, R. (2022). Efisiensi Pengelolaan Aset Negara untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(3), 112-128.
- Zakaria, Agus, Budiman Rusli, Heru Nurasa. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor. *Jurnal Moderat*, 7(2), 311-325.

Kebijakan

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. (2014). Pengelolaan Barang Milik Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024. (2024). Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. (2004). Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KPKNL Lhokseumawe. (2024). Laporan Pengelolaan BMN di Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.
- Suara Nasional. (2022, Juni 15). "KPKNL Lhokseumawe, Penataan BMN Dianggap Masih Buruk." Diakses dari <https://www.suaranasional.com>.
- Warta Ekonomi. (2023, Juli 10). "Reformasi Pengelolaan BMN di Indonesia: Mengatasi Pemborosan dan Inefisiensi." Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id>.
- DJKN. (2021, Desember 15). "Penggunaan BMN dengan SBSK." Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng>.
- DJKN. (2021, Desember 28). "Memotret Utilisasi BMN dengan SBSK." Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut>.